

**UPAYA UNI EROPA DALAM MENDORONG
KESETARAAN HAK LGBT DI POLANDIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

ISMI RUMAISSYA

07041281722093

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**UPAYA UNI EROPA DALAM MENDORONG
KESETARAAN HAK LGBT DI POLANDIA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**ISMI RUMAISYA
07041381722093**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 02 Juli 2021

Pembimbing I

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
NIP.196504271989031003**



Pembimbing II

**Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP.198405182018031001**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
NIP.196504271989031003**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

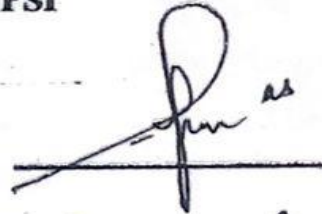
**UPAYA UNI EROPA DALAM MENDORONG
KESETARAAN HAK LGBT DI POLANDIA**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 Juli 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dr. Azhar. SH., M.SC., LL.M
Ketua



Gunawan Lestari Elake. S.IP., M.A
Anggota



Muchammad Yustian Yusa., S.S., M.Si
Anggota



Nur Aslamiah Supli. BIAM., M.Sc
Anggota



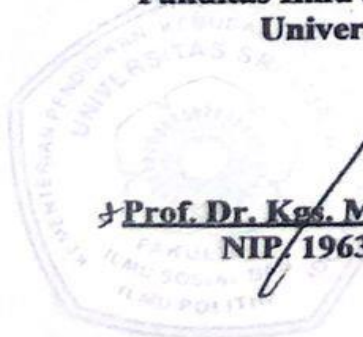
Palembang, 28 Juli 2021

Mengesahkan,

Dekan.

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

†Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri. M.Si.
NIP. 196311061990081001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Rumaisya

NIM : 07041281722093

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ **Upaya Uni Eropa Dalam Mendorong Kesetaraan Hak LGBT di Polandia**” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 02 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Ismi Rumaisya

07041281722093

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk; kedua orang tua tercinta: Bapak Agus Mahdi Dan Ibu Yuslizar, Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Serta Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional.

INTI SARI

Kesetaraan hak masyarakat *LGBT* (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) hingga saat ini masih menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia. Adanya ketidaksetaraan berbentuk diskriminasi dan tidak adanya pemenuhan hak mereka yang seharusnya diberikan oleh negara, masih merajalela terutama di Polandia yang merupakan negara konservatif yang menolak *LGBT*. Polandia merupakan salah satu negara yang tingkat kesetaraan atau hak masyarakat *LGBT*-nya dianggap terparah dikawasan Uni Eropa (*ILGA-Europe*, 2020). Adanya peningkatan diskriminasi *LGBT* dan hak mereka oleh Polandia di tahun 2017-2021, membuat Uni Eropa yang turut memperhatikan permasalahan hak *LGBT* di negara anggotanya, melakukan upaya dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* dan menghentikan diskriminasi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana diskriminasi yang dialami masyarakat *LGBT* dan upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia menggunakan dua pendekatan yaitu Hak Asasi Manusia untuk melihat bagaimana diskriminasi *LGBT* di Polandia berdasarkan tiga kewajiban negara (Penghormatan HAM, Perlindungan HAM, dan Pemenuhan HAM) serta Liberalisme Institusional: Organisasi Internasional untuk melihat bagaimana upaya Uni Eropa berdasarkan tiga peran organisasi internasional (Sentralistik, Independen, dan *Enforcer*) dalam jangka waktu penelitian dari tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polandia melakukan pelanggaran terhadap HAM *LGBT* di negaranya dengan tidak mematuhi ketiga kewajiban negara yaitu Polandia tidak menghargai, tidak memberikan perlindungan dan tidak memenuhi HAM *LGBT*. Uni Eropa melakukan upayanya dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia berdasarkan ketiga peran organisasi internasional, sentralistik dengan membuat kebijakan hak dan diskriminasi masyarakat *LGBT* di Polandia, independen dengan menjadi mediator antara Polandia dan masyarakat *LGBT* disana serta *enforcer* dengan melakukan pemantauan implementasi kebijakan *LGBT* di Polandia.

Kata Kunci: *LGBT*, Polandia, Kesetaraan hak *LGBT*, Uni Eropa, Diskriminasi, Hak asasi manusia, Organisasi internasional

ABSTRACT

The human rights of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) community remains a problem in many parts of the world. There are inequality with the form of discrimination and also the lack of fulfillment of their rights that should have been fulfilled from the state that still rampant especially in Poland. Poland is one of the European countries that level of equality or rights of the LGBT community are considered the worst in the European Union region (ILGA-Europe, 2020). The increase in discrimination against LGBT people and their rights by Poland in 2017-2021, made the European Union, which also pays attention to issues of LGBT rights in its member countries, to make efforts to promote equality of LGBT community rights and stop the discrimination in Poland. This study aims to explain how the discrimination against LGBT community in Poland and the efforts that European Union do to promote the equality of LGBT Community and their rights in Poland using two theories, Human Rights Theory to see how the discrimination of LGBT community in Poland based on three obligations by the state (The Respect for human rights, The Protection of human rights, and the fulfillment of human rights) and also Institutional Liberalism: International Organization to see how the efforts of the European Union based on the three roles of international organizations (centralized, independent, and enforcer) in the research period from 2017-2021. The result of this study shows that Poland violated the human rights of the LGBT community in its country because it does not comply with the obligations, like Poland does not respect, does not provide any protection and there is still no fulfillment of the rights of the LGBT community. The European Union has made efforts to promote equality of LGBT rights in Poland based on the three roles of international organizations, centralized, making policies regarding rights and discrimination of the LGBT community in Poland. Independent, being a mediator between the Polish government and the LGBT community. Enforcers, monitoring the implementation in Poland regarding LGBT.

Key Words: *LGBT, Poland, Equality Rights of LGBT, European Union, Discrimination, Human Rights, International Organization.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., selaku dosen pembimbing satu yang telah menyediakan waktu, tenaga, material, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Pak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing dua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Para tim penguji dan dosen HI yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Pak Ferdiansyah Rivai S.IP., M.A selaku dosen penasehat akademik saya;
5. Kepada admin HI FISIP Unsri yang telah banyak membantu saya dalam proses administrasi skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga saya yang senantiasa mendukung saya untuk tidak bermalas-malasan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat saya SUB, Nabila, Haura, Aliyah, dan Muthia serta teman-teman HI kelas A dan juga kelas keamanan Kampus Palembang;
8. Kiddo yang selalu menasehati dan menjadi tempat berkeluh kesah mengenai skripsi saya;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang,

2021



Ismi Rumaisya
07041281722094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
INTI SARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Konseptual/Teori	19
2.2.1 Liberalisme Institusional: Organisasi Internasional	19
2.2.2 Hak Asasi Manusia	21
2.3 Alur Pemikiran	26
2.4 Argumen Sementara.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28

3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Definisi Konsep.....	28
3.2.1 Hak Asasi Manusia.....	28
3.2.2 Diskriminasi	29
3.2.3 Kesetaraan	29
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Unit Analisis.....	31
3.5 Jenis dan Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data	32
3.8 Teknik Analisis Data.....	33
3.9 Jadwal Penelitian.....	33
3.10 Sistematika Penulisan.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
4.1 Sejarah Hubungan Uni Eropa dan Polandia.....	35
4.2 Diskriminasi Hak LGBT di Polandia.....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
5.1 Upaya Uni Eropa Dalam Mendorong Kesetaraan Hak LGBT di Polandia	57
5.1.1 Sentralistik	58
5.1.2 Independen	65
5.1.3 Enforcer	70
5.2 Analisis Aksi Polandia Terkait LGBT Setelah Dilakukannya Upaya Uni Eropa Dalam Mendorong Kesetaraan Hak LGBT di Polandia	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2 Fokus Penelitian	30
Tabel 3 Jadwal Penelitian	33
Tabel 5.2.1 Laporan <i>Rainbow Europe</i> yang dikeluarkan ILGA-EUROPE Tindakan Polandia Terhadap <i>LGBT</i>	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Alur Pemikiran	26
Grafik 4.1 Survei CBOS Public Opinion Research Center	
Mengenai Sikap Terhadap Homoseksualitas	41
Grafik 4.2.1 Survei Europe CBOS Public Opinion Research	
Center Mengenai Sikap Terhadap Homoseksualitas	43
Grafik 4.2.2 Survei Europe Comission “Eurobarometer	
Discrimination in The EU” pertanyaan QC15.1	47
Grafik 4.2.3 Survei Europe Comission “Eurobarometer	
Discrimination in The EU” pertanyaan QC18R.2	
dan QC18R.3.....	48
Grafik 4.2.4 Survei Europe Comission “Eurobarometer	
Discrimination in The EU” pertanyaan QC13R.10	
dan QC13R.11.....	49

DAFTAR SINGKATAN

ECHR	:European Convention on Human Rights
EU	: European Union
HAM	:Hak Asasi Manusia
ILGA-Europe	:International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe
ILGCN-Poland	: International Lesbian and Gay Cultural Network Poland
KPH	: Kampania Przeciw Homofobii (Campaign Against Homophobia)
LGBT	: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
OSCE	: Organization for Security and Co-operation in Europe
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PiS	: Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice)
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Benua Eropa merupakan benua dengan negara terbanyak yang mengakui keberadaan masyarakat *LGBT* di dunia terutama di Eropa Barat. Dimana sudah lebih dari 40 negara Eropa yang melegalkan *LGBT* di masing- masing negaranya. Namun, walaupun negara-negara tersebut mengakui keberadaan masyarakat *LGBT*, tidak semua negara-negara Eropa ini menyetujui hak-hak yang harusnya dimiliki oleh masyarakat *LGBT*. Polandia merupakan salah satu negara yang tingkat kesetaraan atau hak masyarakat *LGBT*-nya dianggap terparah (ILGA-Europe, 2020). Hal ini dapat dilihat dari ranking yang dilakukan *ILGA-Europe* yang merupakan asosiasi internasional untuk *LGBT* bagian Eropa. Dimana pada ranking ini, Polandia menjadi negara dengan peringkat terakhir (15,84%) untuk kesetaraan Hak *LGBT* dilihat dari kesetaraan, ujaran kebencian, dan kebebasan berekspresi. Walaupun Polandia sudah mengakui aktivitas sesama jenis sejak 11 juli 1932 dengan menandatangani deklarasi PBB, Polandia masih menolak keberadaan masyarakat *LGBT* di mayoritas wilayah negaranya dan masih melakukan berbagai diskriminasi terhadap hak *LGBT*.

Polandia merupakan negara yang dimana 94% populasi negaranya merupakan masyarakat religius yang juga merupakan anggota dari Gereja Katolik Roma (PEW, 2012). Melihat dari mayoritas masyarakat yang religius, sangat memungkinkan bahwa Polandia sendiri merupakan negara yang diskriminatif terhadap masyarakat *LGBT*. Adanya diskriminasi seperti,

masyarakat *LGBT* tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari masyarakat sekitar, pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak dan pengakuan secara legal, tidak adanya perlakuan dan pengakuan yang sama dengan masyarakat heteroseksual serta masyarakat *LGBT* juga tidak memiliki undang – undang perlindungan dari diskriminasi masyarakat. Dimana pada KUHP Polandia, tidak terdapat penjelasan mengenai hukuman atas kejahatan kebencian serta ujaran kebencian berdasarkan orientasi seksual. Hal ini menunjukkan tidak ada perlindungan yang mengatur terhadap diskriminasi masyarakat *LGBT* (Ojewska, 2020). Berbagai macam penolakan, dilakukan oleh Polandia terhadap hak masyarakat *LGBT*-nya. Seperti mantan presiden Polandia, Lech Walesa dengan terang-terangan menunjukkan kebenciannya terhadap masyarakat *LGBT*, dimana dalam acara TV Nasional “*The Facts after The Facts*” pada tahun 2013 dengan mengeluarkan pernyataan yang sangat anti terhadap *LGBT*, “*They are the minority (masyarakat LGBT) and they need to adjust to the majority,... I don't want this minority (masyarakat LGBT) to go out there and seduce my children*” (Staszewski, 2017). Andrzej Duda yang merupakan presiden Polandia pada periode ini, turut melakukan penentangan terhadap hak masyarakat *LGBT* terutama dalam hak pengadopsian anak untuk pasangan sesama jenis (AFP, 2020). Selain itu, salah satu partai politik yang berkuasa di Polandia yaitu Partai Hukum dan Keadilan PiS, menggambarkan masyarakat *LGBT* sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan nilai agama di Polandia. Dimana PiS sendiri menjadikan perlawanan terhadap *LGBT* menjadi agenda mereka untuk membangun kebencian publik Polandia terhadap *LGBT* beserta hak mereka tanpa memikirkan konsekuensinya (Ojewska, 2020). Menurut laporan pada tahun

2017 milik *Center for Research on Prejudice* Universitas Warsaw, sejak PiS berkuasa di tahun 2015, kebencian masyarakat Polandia terhadap masyarakat *LGBT* beserta hak mereka meningkat. Masyarakat Polandia menganggap komunitas *LGBT* sebagai ancaman terbesar bagi Polandia, lebih dari perubahan iklim, krisis demografis, Rusia, serta kebangkitan nasionalisme (Kalan, 2019).

Polandia juga memiliki wilayah-wilayah yang dinamakan sebagai "*Poland's LGBT Free Zone*" (Ash, 2020), di wilayah-wilayah ini semua kegiatan yang berhubungan dengan *LGBT* dilarang keras. Seperti, apabila media menyorot permasalahan *LGBT* maka akan terkena tindakan hukum, masyarakat *LGBT* yang ada di wilayah ini akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan dan dijauhi oleh masyarakat sekitar, serta organisasi yang condong ke kesetaraan *LGBT* tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas secara terbuka serta tidak diberi pendanaan oleh pemerintah (COE, 2020). Terdapat juga penolakan terhadap hak sipil masyarakat *LGBT* di kawasan *LGBT Free Zone*. Seperti, penolakan adanya perlakuan manusiawi dimana masyarakat *LGBT* disana setiap hari merasakan adanya ujaran kebencian dari masyarakat sekitar dan dianggap sebagai ancaman negara, mereka juga sulit mendapatkan hak atas keamanan dan perlindungan diri, tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah, serta sangat sulit untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, kasus lainnya mengenai diskriminasi hak *LGBT* di Polandia yaitu, pada 2019 terjadi penyerangan terhadap beberapa masyarakat *LGBT* pada *equality parade* pertama di kota Bialystok. Penyerangan ini dilakukan oleh masyarakat anti-*LGBT* yang turut datang untuk merusak jalannya parade. Mereka melakukan penyerangan berupa kekerasan secara fisik, mengutarakan kebencian melalui kata-kata kasar yang bersifat

merendahkan, serta tidak ada perlindungan langsung dari pihak berwajib (Czerwiński, 2019). Pada tahun yang sama, uskup agung Marek Jedraszewski membuat komentar berupa ujaran kebencian serta penghasutan terhadap aktivis serta masyarakat *LGBT* dan *LGBTQ-inclusive sex education programs* yang merupakan program pendidikan seks yang di rekomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO). Ia mengatakan bahwa walaupun komunisme sudah hilang dari Polandia, namun ada ideologi baru yang sedang mengancam baik pada tubuh, pikiran, serta hati masyarakat Polandia, yaitu *LGBT*. Ia turut mengatakan bahwa program pendidikan seks *LGBT* yang direkomendasikan WHO, akan membahayakan anak-anak di Polandia (Ring, 2019).

Uni Eropa sebagai organisasi supranasional 27 negara Eropa sendiri, turut memperhatikan permasalahan hak-hak *LGBT*. Dimana 27 negara anggota Uni Eropa sendiri sudah melegalkan aktivitas *LGBT* walaupun beberapa diantaranya masih menolak terkait hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat *LGBT*. Salah satunya Polandia yang sudah menjadi negara anggota Uni Eropa sejak adanya akses Uni Eropa tahun 2004 (EEAS, 2015). Polandia tanpa terkecuali harus mengikuti semua aturan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus memiliki demokrasi yang stabil, hak-hak asasi manusia dan perlindungan kaum minoritas (EEAS, 2015). Dalam *Treaty of Nice* milik Uni Eropa tepatnya pada artikel 6 yaitu, “*The Union is founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law, principles which are common to the Member States*” yang mewajibkan semua anggota Uni Eropa haruslah melindungi serta menghormati hak-hak semua masyarakatnya tak terkecuali masyarakat minoritas. Selain itu, pada pasal 21

Charter of Fundamental Rights of The EU, “Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour,... membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited” yang merupakan aturan untuk melarang adanya tindakan diskriminasi terhadap semua kategori yang disebutkan, salah satunya orientasi seksual. Menurut Conor O’Dwyer dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa Uni Eropa mempengaruhi adanya perkembangan gerakan hak *LGBT* di kawasan Polandia dimana gerakan-gerakan hak *LGBT* ini dianggap lebih kuat dan lebih terorganisir (O’Dwyer, 2012). Sebagai contoh, setelah terjadinya pelarangan *equality parade* di sejumlah kota Polandia, Uni Eropa mendorong para organisasi masyarakat sipil Polandia seperti ILGCN-Poland, Lambda Warszawa, and KPH yang mendukung permasalahan *LGBT* untuk memperluas dan mempertebal jaringan aktivis sekaligus mengumpulkan simpati publik untuk hak-hak *LGBT* dengan cara membantu membawa kasus ini ke Pengadilan Eropa serta memberikan pendanaan untuk mendukung jalannya rencana yang telah dibuat. Pergerakan yang di dorong oleh Uni Eropa ini pada akhirnya berhasil, dimana pengadilan membatalkan larangan pada Poznan dan Warsaw di *the European Court of Human Rights*. Uni Eropa juga mendukung organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan hak-hak *LGBT*, salah satunya ialah *The European Region of The International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association* (ILGA-Europe). Dimana setiap tahunnya Uni Eropa meminta proposal terkait kegiatan-kegiatan yang bertujuan memerangi diskriminasi dan mendorong kesetaraan kepada *ILGA-Europe*, untuk diberikan pendanaan kegiatan melalui program Rights, equality and citizenship (European Commission, 2020). Adanya Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997 tepatnya

pada pasal 13, “*Without prejudice to the other provisions of this Treaty and within the limits of the powers conferred by it upon the Community, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation*” yang mewajibkan adanya tanggung jawab untuk Pengadilan Tinggi Eropa dalam memastikan adanya penghormatan terhadap HAM serta Dewan Uni Eropa yang harus mengambil tindakan yang tepat dalam memerangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di kawasan negara-negara anggota Uni Eropa (Tamsyah, 2017), menambah alasan mengapa Uni Eropa memiliki peran penting dalam membantu mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia dan menghapus diskriminasi hak masyarakat *LGBT* disana.

Keanggotaan Uni Eropa sendiri dapat membantu mendorong kesetaraan hak *LGBT* di negara anggotanya, sebagai contoh negara Irlandia. Irlandia sendiri merupakan negara yang pada awalnya didominasi oleh Gereja Katolik dan merupakan negara konservatif serta menolak adanya *LGBT*, sama seperti Polandia. Namun di tahun 1970, adanya pergerakan yang diketuai oleh David Norris yang berjudul Kampanye Reformasi Hukum Homoseksualitas untuk memperjuangkan dekriminasi homoseksualitas laki-laki dimana pada saat itu laki-laki merupakan objek diskriminasi. Pergerakan yang dilakukan oleh David Norris ini dibawa ke Mahkamah Agung Irlandia pada tahun 1980, namun ditolak dan kalah oleh pemerintah Irlandia (ECHR, 1988). Pada 1988, David Norris membawa kasus tersebut ke ECHR dan hasilnya yaitu pelegalan aktivitas *LGBT* di Irlandia pada tahun 1993 dan berhasil melawan pemerintah Irlandia (Bohan, 2013). Hal ini juga terjadi dikarenakan bantuan Uni Eropa yang

meliberalisasi serta membentuk masyarakat Irlandia yang pada awalnya sangat konservatif dan religius menjadi masyarakat yang terbuka terhadap *LGBT Rights*, dengan 73% masyarakatnya mendukung *LGBT same sex marriage* dan 53% mendukung adanya konsep adopsi untuk pasangan *LGBT*. Di tahun 2010, dilegalkannya *Civil Partnership* untuk pasangan *LGBT*, di 2015 *same sex marriage* di legalkan berdasarkan referendum konstitusional (menggunakan *vote*), serta di tahun 2017 dilegalkannya adopsi anak untuk masyarakat *LGBT* di Irlandia (Halpin, 2018). Keberhasilan Irlandia dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* dengan bantuan Uni Eropa ini tentunya juga menjadi pedoman bagi Uni Eropa dalam membantu mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia yang sampai saat ini masih terjadi diskriminasi disana.

Melihat adanya ujaran kebencian serta tidak adanya *respect* dari pemerintah dan masyarakat Polandia terhadap hak-hak masyarakat *LGBT* dinegaranya, merupakan bentuk pelanggaran terhadap *Treaty of Nice* artikel 6 milik Uni Eropa. Serta banyaknya ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, serta anggota gereja di Polandia mengenai hak *LGBT* yang dianggap masyarakat minoritas, ancaman serta tidak adanya keamanan dari pihak berwajib terhadap mereka, juga menyalahi aturan Uni Eropa tentang wajibnya suatu negara melindungi masyarakat minoritas apabila bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Tentunya dikarenakan masalah diskriminasi hak-hak masyarakat *LGBT* di Polandia, Uni Eropa melakukan berbagai upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana upaya Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana upaya Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual mengenai bagaimana upaya Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan dalam upaya organisasi internasional yaitu Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan bisa diimplementasikan sebagai salah satu sumber bahan informasi yang berkaitan dengan upaya Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak *LGBT* di Polandia dan dapat berkontribusi untuk dipergunakan pelajar dan pengajar dalam pengetahuan mengenai hak asasi manusia untuk masyarakat minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bakry, U. S. (2017). In *Dasar - Dasar Hubungan Internasional* (p. 285). Kencana.
- Budiardjo, M. (1998). In *Dasar - Dasar Ilmu Politik* (p. 120). Jakarta: Gramedia.
- Fulthoni. (2009). *Memahami Diskriminasi: Buku Satu Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Helaluddin & Hengki W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Instrans Publishing.
- Kaczyński, P. M. (2011). *Polish Council Presidency 2011: Ambitions and Limitations*. Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies.
- Levent A & Alexandros P. (2008). *Planning Research in Hospitality and Tourism*. Hungary: Elsevier Ltd.
- Locke, J. (1690). *Two Treaties on Civil Government*. England: Awnsham Churchill.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Newnham, J. (1998). *Dictionary of Internasional Relations*. London: Penguin Books.
- Robert J and Georg S. (2013). *Introduction to International Relations, Fifth Edition*. New York: Oxford University Press.
- Robert J and Georg S. (2015). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches (6th edn)*. Oxford: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. . Bandung.: PT. Remaja Rosdakarya.
- Thomas, C. (2000). In *Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality* (pp. 5-6). Virginia: Pluto Press.

Film:

Staszewski, B. (Director). (2017). *Article 18 marriage (in) equality in Poland* [Motion Picture].

Jurnal:

Binnie, J. (2014). Neoliberalism, Class, Gender and Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Politics in Poland. *Int J Polit Cult Soc* , 241–257.

Charter of Fundamental Rights of The EU. (2000). Charter of Fundamental Rights of The European Union. *Official Journal of the European Communities* , 13.

Gromadzki, G. (2018). Poland in the EU: Unavoidable marginalisation with a small question mark. *Friedrich Ebert Stiftung Warsaw* , 2.

Ireneusz K & Maciej W. (2018). Poland and the European Union. *Oxford Research Encyclopedia of Politics* , 6-9.

Korolczuk, E. (2020, April 8). Poland's LGBT-free zones and global anti-gender. *ZOiS Spotlight* , p. 1.

O'Dwyer, C. (2012). Does The EU Help or Hinder Gay-Rights Movements in Post-Communist Europe? The Case of Poland. *Jurnal Ilmiah Internasional Universitas Florida* .

Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum* , 34.

Rostek, D. M. (2011). Same Sex Couples in Poland: Challenges of Family Life. *Journal of LGBT Family Studies* .

Rzeplinski, A. (2008). Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation–Poland. 48-49.

Setiawan, A. A. (2010). Dampak Globalisasi Terhadap Penguatan Pemerintah Lokal Berbasis Keamanan Manusia di Papua. *Jurnal Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)* , 54-55.

Tamsyah, I. (2017). Eropanisasi Kesetaraan Hak Lgbt: Studi Kasus Negara Polandia . *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Universitas Airlangga* .

Publikasi Pemerintah:

COE. (2020, December 03). *Memorandum on the stigmatisation of LGBTI people in Poland*. Retrieved January 04, 2021, from Commissioner for Human Rights:

<https://rm.coe.int/memorandum-on-the-stigmatisation-of-lgbti-people-in-poland/1680a08b8e>

Constitutional Committee of Poland. (1997). *The Constitution Of The Republic of Poland*. Republic of Poland: Dziennik Ustaw.

EC. (2018). *Abstracts of the successful proposals*. Brussels: European Commission.

ECHR. (1988). *Case of Norris vs Ireland*. Strasbourg: European Court of Human Right.

EEAS. (2015, January). *Sekilas Uni Eropa*. Retrieved December 16, 2020, from European Union External Action Service: https://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglace_id.pdf

European Commission. (1997). *Agenda 2000 - Commission Opinion on Poland's Application for Membership of the European Union*. Brussels.

European Commission. (2014). *EU expenditure and revenue 2014-2020*.

European Commission. (2020). *EU funding for LGBTIQ equality; The European Commission supports EU countries and civil society in ending discrimination through the rights, equality and citizenship (REC) programme 2014-2020*. Retrieved May 2021, 23, from https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/eu-funding-lgbtiq-equality_en

European Convention. (2000). *The Charter of Fundamental Rights of The European Union*. European Union.

European Parliament. (2021, March 11). *Parliament Declares The European Union an 'LGBTIQ Freedom Zone'*. Retrieved May 11, 2021, from News European Parliament: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99219/parliament-declares-the-european-union-an-lgbtiq-freedom-zone>

European Parliament. (2019, December 18). *Parliament strongly condemns 'LGBTI-free zones' in Poland*. Retrieved March 30, 2021, from European Parliament News: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland>

ILGA Europe. (2019). *Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex People 2019 : Case Poland 2018*. Brussels: ILGA Europe.

- ILGA. (2017-2021). *Rainbow Europe*. Brussels: ILGA EUROPE.
- ILGA-Europe. (2019). *Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI 2019*. Brussels: ILGA-Europe.
- ILGA-Europe. (2020). *Country Ranking of Human Rghts and Equality*. Retrieved 12 16, 2020, from Rainbow Europe: <https://rainbow-europe.org/country-ranking#eu>
- Jourová, V. (2017). *Annual Report 2017 on The List of Actions byTthe Commission to Advance of LGBTI Equality Leading by Example #EU4GBTI*. Brussel: European Commission.
- Jourová, V. (2018). *Annual Report 2018; on the List of actions to advance LGBTI equality #EU4LGBTI*. Brussels: European Commission.
- Ministry of Foreign Affairs Poland. (2014, July 07). *Enlargement of the European Union*. Retrieved February 27, 2021, from PolskawUE.GOV.PL: <https://web.archive.org/web/20151008070124/https://polskawue.gov.pl/Rozszerzenie,Unii,Europejskiej,7652.html>
- Official Website of EU. (2019, Juni 26). *Human rights and democracy*. Retrieved February 16, 2021, from Europa.eu: European Union: https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_en
- PEW. (2012). *The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010*. Washington: *Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life* , 49.
- PEW Research Center. (2019, October 28). *Same-sex marriage in Europe*. Retrieved March 8, 2021, from PEW Research Center: https://www.pewresearch.org/ft_19-10-22_europessm/
- UN. (2016). *Human Security Handbook*. New York: United Nation Trust Fund for Human Security.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- United Nations General Assembly. (1948). *The Universal Declaration of Human Rights*. Paris: United Nations.
- United Nations General Assembly . (1966). *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. New York: United Nations.

Thesis/Laporan Penelitian Ilmiah:

Linde, P. v. (2015). LGBT- Rights in Poland, Italy and Portugal: Why Does Acceptance Differ? *MSc. Thesis, Political Science* , 20.

Website:

ABC News. (2021, February 10). *Poland's 'LGBT-free zones' could lead to hate crimes and violence, rights group warns*. Retrieved March 3, 2021, from ABC NEWS: <https://www.abc.net.au/news/2021-02-11/hate-crime-violence-feared-in-polish-lgbt-free-zones/13142918>

AFP. (2020, July 4). *Poland's president plans to forbid adoption by same-sex couples*. Retrieved December 16, 2020, from The Guardian International Edition: <https://www.theguardian.com/world/2020/jul/04/poland-president-plans-to-forbid-adoption-by-same-sex-couples>

Akhmady, F. (2020, February 28). *Security Studies: Human Security Concept*. Retrieved Februari 06, 2021, from IISAUC: <https://www.iisau.org/2020/02/28/human-security-concept/>

Ash, L. (2020, September 20). *Inside Poland's 'LGBT-free zones'*. Retrieved January 04, 2021, from BBC News: <https://www.bbc.com/news/stories-54191344>

BBC . (2020, September 28). *Poland LGBT: Diplomats from 50 countries call for end to discrimination*. Retrieved May 25, 2021, from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-54317902>

BBC. (2020, August 5). *Poland LGBT protests: Three charged with hanging rainbow flags off statues*. Retrieved March 16, 2021, from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-53673411>

Bohan, C. (2013, June 24). *Today marks the 20th anniversary of the decriminalisation of homosexuality*. Retrieved April 27, 2021, from Thejournal.ie: <https://www.thejournal.ie/anniversary-decriminalisation-homosexuality-ireland-963902-Jun2013/>

Ciobanu, C. (2021, March 11). *European Parliament Declares Whole of EU an 'LGBT FREEDOM ZONE'*. Retrieved May 11, 2021, from Balkan in Sight: Reporting Democracy: <https://balkaninsight.com/2021/03/11/european-parliament-declares-whole-of-eu-an-lgbt-freedom-zone/>

Czerwiński, M. (2019, July 31). *How a hashtag looks set to offer LGBTI people a #MeToo moment in Poland*. Retrieved Februari 14, 2021, from Euronews: <https://www.euronews.com/2019/07/31/how-a-hashtag-looks-set-to-offer-lgbti-people-a-metoo-moment-in-poland-view>

- Equal Rights Trust. (2008, April 05). *Declaration of Principles on Equality*. Retrieved February 17, 2021, from Equal Rights Trust: <https://www.equalrightstrust.org/content/declaration-principles-equality>
- Equaldex. (2013, August). *LGBT Rights in Poland* . Retrieved March 1, 2021, from Equaldex: Equality Index: <https://www.equaldex.com/region/poland>
- Euronews & Reuters. (2019, July 29). *Marches for LGBT rights in Warsaw and Berlin after Pride attack in Poland*. Retrieved March 4, 2021, from Euronews: <https://www.euronews.com/2019/07/27/berlin-and-warsaw-hold-pro-lgbt-parades>
- Halpin, H. (2018, June 24). *Here's a short history of the battle for LGBT rights in Ireland*. Retrieved April 27, 2021, from TheJournal.ie: thejournal.ie/history-lgbt-rights-ireland-4078424-jun2018/
- Higgins, A. (2021, April 10). *After Going 'Free of L.G.B.T.,' a Polish Town Pays a Price*. Retrieved May 28, 2021, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2021/04/10/world/europe/poland-lgbt-free-krasnik.html>
- HRW Team. (2020, August 7). *Poland: Crackdown On LGBT Activists*. Retrieved March 16, 2021, from Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2020/08/07/poland-crackdown-lgbt-activists>
- Kafkadesk. (2019, February 20). *Warsaw Mayor Pledges Support to Poland's LGBT Community*. Retrieved March 30, 2021, from Kafkadesk; Ultra-Local News From Central Europe: <https://kafkadesk.org/2019/02/20/warsaw-mayor-pledges-support-to-polands-lgbt-community/>
- Kalan, D. (2019, October 19). *In Poland's Upcoming Election, the Law and Justice Party Is Demonizing the LGBT Community to Win*. Retrieved April 22, 2021, from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2019/10/09/poland-pis-demonizing-lgbt-community-win-upcoming-elections/>
- Monika P & Benjamin N. (2020, November 12). *European Union Tries to Counter Anti-LGBTQ Wave in Hungary and Poland*. Retrieved February 26, 2021, from The New York Times: [nytimes.com/2020/11/12/world/europe/hungary-poland-lgbt-rights-eu.html](https://www.nytimes.com/2020/11/12/world/europe/hungary-poland-lgbt-rights-eu.html)
- Ojewska, N. (2020, October 6). *Poland's culture war: LGBT people cornered by toxic politics are turning to civil disobedience*. Retrieved April 22, 2021, from EURONEWS: <https://www.euronews.com/2020/10/06/poland-s-culture-war-lgbt-people-cornered-by-toxic-politics-are-turning-to-civil-disobedie>
- Pawłowska, D. (2018, July 23). *Poland's quarrel with the European Union*. Retrieved February 27, 2021, from European Data Journalism Network:

<https://www.europeandatajournalism.eu/index.php/eng/News/Data-news/Poland-s-quarrel-with-the-European-Union>

- Prończuk, M. (2019, December 31). *Employee who refused LGBT client has case dismissed by court at justice minister's request*. Retrieved March 20, 2021, from Notes from Poland: <https://notesfrompoland.com/2019/12/31/employee-who-refused-lgbt-client-has-case-dismissed-by-court-at-justice-ministers-request/>
- Reuters. (2020, August 18). *Polish 'LGBT-free' town gets state financing after EU funds cut*. Retrieved May 28, 2021, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-poland-eu-lgbt-idUSKCN25E1QP>
- Ring, T. (2019, October 07). *LGBTQ Activism Is the New Communism, Catholic Archbishop Says*. Retrieved February 14, 2021, from Advocate: <https://www.advocate.com/religion/2019/10/07/lgbtq-activism-new-communism-catholic-archbishop-says>
- Rob P & Ivana K. (2020, September). *You don't belong here'; In Poland's 'LGBT-free zones,' existing is an act of defiance*. Retrieved March 4, 2021, from CNN News: <https://edition.cnn.com/interactive/2020/10/world/lgbt-free-poland-intl-scli-cnnphotos/>
- Santora, M. (2019, April 7). *Poland's Populists Pick a New Top Enemy: Gay People*. Retrieved March 16, 2021, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/04/07/world/europe/poland-gay-rights.html>
- Strupczewski, J. (2020, November 12). *EU launches LGBT protection strategy as homophobia rises in east*. Retrieved March 30, 2021, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-eu-equality-lgbt/eu-launches-lgbt-protection-strategy-as-homophobia-rises-in-east-idUSKBN27S1MW?edition-redirect=ca>
- Tilles, D. (2020, November 10). *Bill banning LGBT parades submitted to Polish parliament*. Retrieved March 5, 2021, from NFP (Notes From Poland): <https://notesfrompoland.com/2020/11/10/bill-banning-lgbt-parades-submitted-to-polish-parliament/>
- Townley, B. (2005, May 20). *Polish capital bans Pride again*. Retrieved March 2, 2021, from [Gay.com](http://www.gay.com) U.K.: <https://web.archive.org/web/20070313155353/http://www.gay.com/news/article.html?date=2005/05/20/4&navpath=/channels/pride/>
- Turner, J. (2020, September 03). *European Union's Intervention on Poland's LGBT-Free Zones*. Retrieved February 26, 2021, from World Aware: <https://www.worldaware.com/resources/blog/european-unions-intervention-polands-lgbt-free-zones>

VOA. (2020, July 21). *Didesak Uni Eropa Legalkan Pernikahan Gay, Polandia Protes*. Retrieved February 26, 2021, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/didesak-uni-eropa-legalkan-pernikahan-gay-polandia-protas-/5510993.html>

Watt, N. (2005, October 25). *Polish leader's anti-gay stance threatens EU voting rights*. Retrieved March 8, 2021, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2005/oct/25/eu.poland>